

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Tema:
Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan

IKATAN SARJANA PENDIDIKAN INDONESIA (ISPI)

bekerjasama dengan

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

2012



DAFTAR ISI

Halaman

1 KATA PENGANTAR KETUA ISPI

2 PENDAHULUAN

3 DAFTAR ISI

I

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Oleh: Prof. Soedijarto, MA

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Oleh: Prof. Dr. Fakry Gafar, M.Ed

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Oleh: Prof. Dr. Agus Dwiyanto

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 di Sekolah sebagai Sarana Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan. **Oleh: Mulyono, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**

Optimalisasi Desentralisasi Pendidikan (Model *Integrative RegMap-Regulatory Impact Assesment* (IRR) Pembentukan Perda Pendidikan yang Berbasis Pendidikan Berkarakter Kearifan Nilai Lokal). **Oleh: Rodiyah, UNNES Semarang**

Redesain Pendidikan Kejuruan di Indonesia sebagai suatu Wacana Ke Depan. **Oleh: Badraningsih Lestari, FT UNY**

Redesain Sistem Pendidikan Kewirausahaan Di Sekolah Menengah Kejuruan: Alternatif Pengentasan Pengangguran* Di Indonesia. **Oleh: Nuryadin Eko Raharjo, FT UNY**

Rekonstruksi Pendidikan dan Penguatan Modal Sosial. **Oleh: Siti Irene Astuti D, FIP UNY**

Isu-Isu Strategis Desentralisasi Pendidikan Kejuruan Indonesia. **Oleh: Dr. Putu Sudira, M.P. FT UNY**

Pembelajaran Terakomodasi dalam Model Pendidikan Inklusi. **Oleh: Mumpuniarti**

II

Redesain Sistem Pendidikan dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. **Oleh: Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd, Rektor UPI Bandung**

Redesain Sistem Pendidikan dan Manajemen Pendidik dan Tenaga

Kependidikan. **Oleh: Prof. Dr. Muchlas Samani, Rektor UNESA Surabaya**
Redesain Sistem Pendidikan Guru dan Sistem Manajemen Pendidikan. **Oleh: Prof. Dr. Noeng Muhadjir**

Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor. **Oleh: Dr. Muh Farozin, FIP UNY**

Masa Depan Profesi Guru dalam Bingkai Sentralisasi Pendidikan (Kajian terhadap Praktik Pengembangan Profesi Guru di Daerah Pasca berlakunya UU No. 14 tentang Guru dan Dosen Tahun 2005). **Oleh: Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd, UPI Bandung**

Studi Orientasi Tugas Pengawas dan Kepala Sekolah (Suatu Gagasan Melakukan Revitalisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Kepengawasan Pendidikan di Era Desentralisasi Pendidikan). **Oleh: Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M. Pd Universitas Negeri Gorontalo**

Kontra-Profesional dalam Pengadaan dan Pemberdayaan Guru. **Oleh: Udik Budi Wibowo, FIP UNY**

Memulihkan Kesemrawutan dalam Praktik Pendidikan di Sekolah. **Oleh: Abdullah Pandang, FIP UNM**

Redesign Pendidikan Calon Guru untuk Mendukung Implementasi Pendidikan Inklusif. **Oleh: Pujaningsih M.Pd, FIP UNY**

Penguatan Fungsi Pengawas Sekolah dalam Kerangka Perbaikan Mutu Pendidikan di Indonesia. **Oleh: Rahmania Utari, M.Pd, FIP UNY**

Model Hipotetik Jalur Karier Lulusan Program Studi S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan Sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Berbagai Jenis Lembaga Pendidikan. **Oleh: Priadi Surya, M.Pd, FIP UNY**

Redesain Sistem Pendidikan Guru Di LPTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah. **Oleh: M. Joko Susilo, M.Pd; Nani Aprilia, M.Pd; dan Nur Hidayah, M.Pd, UAD Yogyakarta**

Peran Guru dan Pendidikan Guru Masa Depan. **Oleh: Bambang Setiyo Hari Purwoko, FT UNY**

Guru Profesional Dan Relevansi Pendidikan. **Oleh: Taty Fauzi dan Mardiana**

Penambahan Program Wajib Kokurikuler Sebagai Redesain Sistem Pendidikan Guru. **Oleh: Hermanto, FIP UNY**

Model Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Melalui Pembelajaran Berbasis Kerja (*Work-Based Learning*). **Oleh: Budi Tri Siswanto, FT UNY**

Entrepreneurship Hidden Curriculum (EHC): Model Kurikulum Bernuansa Kewirausahaan di Perguruan Tinggi. Oleh: Bayu Dwi Nurwicaksono, UNESA Surabaya

Redesain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Era Kemanusiaan Universal. *Oleh: Anik Ghufron, FIP UNY*

Kaji Ulang Standar Kompetensi Lulusan dalam Konteks Redesain Sistem Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Oleh: Dr. Mukminan, FIS UNY*

Analisis Pelaksanaan Proses Pendidikan di Indonesia. *Oleh: Makmuri, FMIPA UNJ Jakarta*

Redesain Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar (SK Dan KD) IPA Terpadu SMP/MTs. *Oleh: Ayu Rahayu, Ulfiana Prisdiansari, Elsa Yulianingsih, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta*

Redesain Kurikulum Pendidikan Kejuruan. *Oleh: Prof. Dr. H. Mukhidin, M.Pd. dkk*

Pengembangan Kerangka Evaluasi Implementasi Kurikulum Berbasis Standar Dalam Pendidikan Kejuruan. *Oleh: Dedy Suryadi, M.Pd. dan Drs. Sukadi, M.Pd., MT. FPTK UPI Bandung*

Analysis Situasi Pendidikan Bahasa Inggris Kejuruan Di SMK. *Oleh: Estu Widodo*

Redesain Sistem Pembelajaran Pada Sekolah Berstandar Internasional. *Oleh: Triwati Rahayu, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*

Evaluasi Integrasi Soft Skills Dalam Kurikulum Pendidikan Kejuruan: Ukuran Hasil Belajar Sebagai Indikator Keberhasilan Pengembangan Profesional. *Oleh: Sri Wening, FT UNY*

Pembangunan Karakter dalam Pembelajaran. *Oleh: Prof. Dr. Belferik Manullang*

Redesain sistem Kurikulum Pembelajaran Bahasa Inggris Calon Guru SD/AUD Berbasis Communicative Competence. *Oleh: Dr. Ali Mustadi, M.Pd. FBS UNY*

Redesain Kurikulum S₁ Pendidikan IPA Menuju Standards For Secondary Science Teacher Preparation. *Oleh: Insih Wilujeng, FMIPA UNY*

Urgensi Integrasi Standar Kompetensi Lulusan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Oleh: Anas Arfandi, FT UNM*

Rekonstruksi Pembelajaran Berbasis Metode Socratic (Strategi untuk Mengoptimalkan Hasil Belajar Siswa dan Meningkatkan Kemampuan Belajar Guru. **Oleh: Nandang Rusmana**

Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pembelajaran Melalui Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pembelajaran Berbasis Kompetensi-SCL. **Oleh: Dr. R. Mursid, M.Pd. UNIMED Medan**

Teknik Latihan Keterampilan Dasar Konseling Individual (Studi Eksperimen untuk Menguji Efektivitas Teknik *Microcounseling*, *Interpersonal Process Recall* (IPR) dan *Didactic Experiential* (DE) dalam Melatihkan Keterampilan Dasar Konseling Individual terhadap Mahasiswa Jurusan PPB Angkatan 2007). **Oleh: Anne Hafina A, FIP UPI Bandung**

Redesain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Telaah terhadap Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian). **Oleh: Syukri Fathudin Achmad Widodo, FT UNY**

IV

Sistem Pendanaan Pendidikan. **Oleh: Dr. Abbas Gozali, MA**

Sistem Pendanaan Pendidikan. **Oleh: Prof. Dr. Aris Munandar**

Formula Sistem Pendanaan Sekolah yang Berkeadilan. **Oleh: Prof. Muljani A Nurhadi. M.Ed., M.S., P.hD, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta**

Meningkatkan partisipasi Orang Tua dalam pembiayaan pendidikan pada jenjang SMP (Studi di kawasan pedesaan di Kota Semarang). **Oleh: Imam Tadjri. FIP UNNES Semarang.**

V

Sarana dan Prasarana Pendidikan. **Oleh: Prof. Dr. Bedjo Sujanto, Rektor UNJ Jakarta**

Sarana dan Prasarana Pendidikan. **Oleh: Dr. Gatot Hary Priowiryanto**

Strategi Penyebaran Konten Pendidikan Berbasis *Digital Video Broadcasting via Satellite* untuk Wilayah Tak terjangkau Internet. **Oleh: Drs. Jaslin Ikhsan, M.App.Sc., Ph.D. FMIPA UNY dan Hafid Setyo Hadi, ST, Manajer IT-Network SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC), Jakarta**

Profil Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bali. **Oleh: Made Agus Dharmadi, S.Pd., M.Pd. FOK Undhiksa Singaraja Bali**

Stadion Maguwoharjo Sebagai Sarana Prasarana Olahraga, Rekreasi, dan Bisnis Di Kabupaten Sleman. **Oleh: Sulistiyono, FIK UNY**

VI

Evaluasi Sistem Pendidikan. **Oleh: Prof. Furqon, M.Pd., M.A., P.h**

Penerapan Evaluasi Adversary dalam Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan. **Oleh: Prof. Soenarto, MSc, MA, Ph.D.**

Sistem Penilaian Hasil Belajar ABK dalam Implementasi Pendidikan Setting Inklusi. **Oleh: Sukinah FIP UNY**

Perkembangan Kualitas Pendidikan di Indonesia: Analisis The Global Competitiveness Report. **Oleh: Florentinus Nugroho Hardianto, Harapan Bangsa Business School, Bandung**

Uji Kompetensi Seleksi Guru Berbasis Bidang Studi sebagai Instrumen Danda dalam Pengembangan Profesionalitas Guru. **Oleh: Udi Utomo, UNNES Semarang**

Penilaian Kinerja Guru dan Uji Konsistensi Antar Penilai. **Oleh: Faridl Musyadad, Mahasiswa PPs UNY**

Model Butir Bersama pada Ujian Akhir Daerah untuk Memantau Kualitas Pendidikan di Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi. **Oleh: Dr. Heri Retnawati, FMIPA UNY**

Pengembangan Model Asesmen (Evaluasi) Berorientasi Karir Di Sekolah Menengah Kejuruan. **Oleh: Wahid Munawar, UPI Bandung**

Kedudukan bimbingan dan konseling dalam redesain sistem pendidikan guru.
Oleh : Eka Wahyuni, S. Pd., MAAPD,

Implementasi kompetensi komputer grafis dan surveying pada tugas jalan raya I Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa jpts. **Oleh : Iskandar Muda Purwaamijaya, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung**

Membumikan ayat-ayat manajemen Menuju kemandirian satuan pendidikan.
Oleh : Nur Aedi, Dr, M.PD

Pengembangan evaluasi lahan menggunakan autodeskmep untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa jpts fptk upi pada teknik penyehatan.
Oleh : Rina Marina Masri

REDESAIN PENDIDIKAN GURU UNTUK MENDUKUNG PENDIDIKAN INKLUSIF

Abstrak

Oleh: Pujaningsih M.Pd

Tantangan dunia pendidikan terus berubah seiring kebijakan pemerintah serta tantangan di lapangan. Saat ini Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa semua orang maupun anak mempunyai hak yang sama seperti orang pada umumnya untuk mendapat akses fasilitas umum termasuk pendidikan. Setiap sekolah diharapkan inklusif tidak terbatas sekolah yang saat ini tercatat sebagai sekolah inklusif. Tantangan di lapangan juga menunjukkan: a) keberadaan anak dengan kebutuhan khusus usia sekolah masih banyak ditemui belum bersekolah, b) jumlah SLB terbatas, c) pelaksanaan pendidikan inklusif terkendala sikap dan kompetensi guru dan d) keberadaan anak dengan kebutuhan khusus tersebut hampir dapat ditemui di setiap sekolah reguler. Kesiapan kompetensi guru untuk menjawab hal tersebut menjadi pekerjaan besar bagi LPTK.

Kompetensi guru yang ada untuk saat ini perlu dievaluasi terkait dengan tantangan peserta didik dan kebijakan pemerintah. Kompetensi profesional memerlukan banyak penyesuaian terkait dengan keragaman peserta didik (salah satunya anak dengan kebutuhan khusus yang memerlukan layanan khusus).

Tiga alternatif yang dikemukakan untuk redesain pendidikan calon guru yang dikemukakan dalam makalah ini yaitu: a) Pengayaan materi perkuliahan keguruan yang menunjang kompetensi pedagogi, b) Pengambilan matakuliah dan atau PPL (praktik pengalaman lapangan) secara bersama antara calon guru umum/reguler dengan calon guru khusus untuk memberikan peluang membangun kolaborasi dan c) penambahan matakuliah baru (pengelolaan perilaku).

Kata kunci: pendidikan guru, pendidikan inklusif

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan guru menjadi ujung tombak kualitas pendidikan di suatu negara. Guru-guru yang berkualitas akan mampu menghadirkan proses belajar mengajar yang bermutu dan akan dihasilkan generasi penerus bangsa yang handal. Berbagai kebijakan perubahan kurikulum maupun kebijakan lainnya tidak akan menunjukkan hasil yang optimal apabila tidak didukung kualitas guru. Target standar minimal kelulusan UNAS yang telah dicanangkan juga memerlukan kepiawaian guru yang mampu menyeimbangkan antara fokus pendidikan yang tidak hanya mengejar prestasi semata. Tentu saja hal ini tidak semudah mengejar prestasi peserta didik yang ditentukan oleh mutu guru yang dikemukakan Rivkin, Hanushek, dan Kain (1998 dalam Rice JK. 2003) bahwa prestasi peserta didik ditentukan oleh kualitas guru.

Tantangan lain muncul ketika pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas pada akhir tahun 2011 setelah pada tahun 2007 menandatangani konvensi tersebut. Bersama Laos dan Filipina, Indonesia merupakan negara ke-3 yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka anak-anak dengan kebutuhan khusus berhak mendapat layanan fasilitas umum termasuk pendidikan tanpa diskriminasi. Persiapan kompetensi guru yang sesuai untuk menyambut langkah besar tersebut menjadi agenda panjang untuk dimulai dari LPTK sebagai pencetak guru dan mengawal kebijakan pemerintah.

Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2008 telah mengungkapkan 4 kompetensi guru beserta rinciannya secara jelas. Ke-empat kompetensi tersebut (kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional) saat ini dirancang diperoleh melalui pendidikan jenjang S-1 dan pendidikan profesi. Namun, ada satu hal yang belum menjadi perhatian dalam

proses pendidikan guru yaitu mempersiapkan guru untuk mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik yang beragam, termasuk anak dengan kebutuhan khusus.

Keberagaman profil peserta didik dapat ditemukan di setiap kelas. Penelitian Pujaningsih dkk., pada tahun 2002 di kecamatan Berbah menemukan anak dengan kesulitan belajar sebesar 36% dengan rincian 12% diantaranya *slow learner*, 16% berkesulitan belajar spesifik (*LD/learning disability*) dan 17% tunagrahita (*mentally retarded*). Hal tersebut mencirikan keberagaman potensi dan kebutuhan belajar yang perlu dipenuhi oleh guru. Untuk saat ini layanan tersebut dapat dijumpai di sekolah inklusif meskipun keberagaman tersebut dapat dijumpai di setiap sekolah. Situasi ini menjadi kurang menguntungkan bagi peserta didik yang mempunyai kesulitan belajar namun belum ditangani karena sekolah tidak inklusif.

Seiring bergulir isu pendidikan inklusif sejak awal tahun 2000 di Indonesia maka telah dijumpai matakuliah bermuatan ke-PLB an untuk jenjang pendidikan guru SD di beberapa LPTK negeri maupun swasta guna membekali pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Namun, ternyata hal tersebut belum memadai karena beberapa hal berikut: a) keberadaan anak berkebutuhan khusus tidak hanya dijumpai di jenjang SD, b) penanganan mereka memerlukan kolaborasi antara guru khusus dengan guru reguler dan ketrampilan kerjasama antar profesi ini belum dikembangkan di perguruan tinggi, c) pengalaman belajar yang membekali tentang pengetahuan penanganan anak berkebutuhan khusus masih difokuskan pada matakuliah tersendiri secara terpisah dan terintegrasi dengan matakuliah lain yang terkait. Berdasarkan ketiga hal tersebut maka kajian lanjut tentang redesign pendidikan calon guru untuk mendukung pendidikan inklusif dikemukakan.

2. Permasalahan

- a. Keberagaman peserta didik di kelas dan jumlah ABK usia sekolah belum mendapat akses layanan pendidikan menjadi tantangan sekolah dan guru untuk mampu menangani peserta didik yang beragam.
- b. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan perluasan akses pendidikan untuk penyandang disabilitas juga turut mendorong penyesuaian proses pendidikan

guru untuk membekali ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman tentang pemberian layanan pendidikan untuk keberagaman anak (termasuk diantaranya anak dengan kebutuhan khusus atau dengan disabilitas).

- c. Proses pendidikan calon guru di jenjang S-1 maupun program profesi yang saat ini sudah maupun belum memperhatikan isu layanan untuk keberagaman anak memerlukan redesain dalam rangka menanggapi kebijakan pemerintah saat ini.

B. PEMBAHASAN

1. Tantangan Pemenuhan Kebutuhan Peserta Didik dengan kebutuhan khusus

Tantangan pemenuhan kebutuhan peserta didik yang beragam untuk saat ini antarlain sebagai berikut:

- a. Keberadaan peserta didik yang beragam di sekolah reguler maupun sekolah inklusi memerlukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Keberagaman anak dengan kebutuhan khusus ditemukan di sekolah inklusi. Jumlah anak dengan kebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusi pada tahun 2007/2008 berdasarkan data Direktorat PK dan PLK sebanyak 15. 144 anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Tunanetra sebanyak 385 anak
2. Tunarungu-wicara sebanyak 291 anak
3. Tuna grahita sebanyak 2219 anak
4. Tuna daksa sebanyak 267 anak
5. Tunalaras sebanyak 291 anak
6. Autis 230 anak
7. Tunaganda 45 anak
8. Kesulitan dan lamban belajar sebanyak 11.420 anak
9. Indigo sebanyak 32 anak (Sutji Harijanto, 2011).

Data di atas menunjukkan keberadaan anak dengan kebutuhan khusus di sekolah inklusi cukup beragam dan untuk penanganan mereka memerlukan kolaborasi

antara guru khusus dengan guru kelas. Hal ini masih menjadi kendala sampai saat ini.

Keberadaan anak dengan kebutuhan khusus selain di sekolah inklusi juga banyak ditemukan di sekolah reguler. Berdasarkan hasil penelitian Unik Ambarwati dkk (2011) menemukan bahwa di 10 SD di kota Yogyakarta selalu ditemukan anak dengan kesulitan membaca dengan persentase yang bervariasi. Hasil penelitian Pujaningsih dkk., pada tahun 2002 di kecamatan Berbahjuga menemukan anak dengan kesulitan belajar sebesar 36% dengan rincian 12% diantaranya *slow learner*, 16% berkesulitan belajar spesifik (*LD/learning disability*) dan 17% tunagrahita (*mentally retarded*). Keberadaan anak-anak dengan kebutuhan khusus tersebut masih belum mendapatkan pelayanan yang memadai karena tidak ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Hasil penelitian tentang penerimaan guru terhadap anak dengan kesulitan belajar yang masih jarang dijumpai (Bryan, 1997; Sale & Carey, 1995 dalam Pavri & Luftig, 2000). Labeling 'bodoh' untuk anak-anak tersebut masih kerap ditemui saat interviu dengan guru. Situasi ini sering dijumpai dan penuturan guru-guru yang mengarah pada pemahaman yang kurang mengenai keberagaman peserta didik menjadi kendala dalam pemberian layanan kepada mereka.

- b. Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi masih mengalami banyak kendala.

Isyu pendidikan inklusif yang bergulir sejak tahun 2000 di Indonesia membawa pro dan kontra. Berbagai permasalahan yang timbul saat ini setelah lebih dari 10 tahun diimplementasikan dalam praktik pendidikan inklusif menunjukkan hambatan yang nyata pada sisi penerimaan. Hal ini terungkap dalam dalam paparan laporan situasi pendidikan inklusif di Indonesia dan Malaysia pada seminar tanggal 3 November 2009 (Kompas, 4 November 2009) yang menemukan banyak orangtua enggan mengirim anak dengan berkebutuhan khusus ke sekolah biasa karena khawatir akan mendapat penolakan atau diskriminasi. Hambatan serupa juga ditemukan dalam seminar Agra bahwa hambatan sikap jauh lebih besar daripada kesulitan ekonomi (Stubbs, 2002).

Hasil monitoring sekolah inklusi oleh Direktorat PSLB menemukan bahwa sebagian besar **sekolah inklusi mengalami kesulitan dalam modifikasi kurikulum dan melakukan asesmen akademik dan non akademik** (Sutji Harijanto, 2011). Situasi tersebut menjadi berdampak negatif terhadap anak dengan kebutuhan khusus di sekolah inklusif ketika jumlah guru khusus terbatas sehingga fokus layanan berada pada guru reguler/kelas dengan penerimaan dan penguasaan ketrampilan mengajar peserta didik yang beragam masih bervariasi.

- c. Jumlah anak dengan kebutuhan khusus yang belum mendapat akses pendidikan Sutji Harijanto (2011) menuturkan bahwa jumlah anak dengan kebutuhan khusus di Indonesia yang belum mengenyam pendidikan sebanyak 231.371 (73,85%). Secara detil jumlah anak dengan kebutuhan khusus yang belum bersekolah di DIY berdasarkan jenis kekhususan adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Data anak dengan kebutuhan khusus berdasarkan jenis kekhususan di DIY

No	Jenis Kekhususan	jumlah ABK	bersekolah	tidak bersekolah	persentase tidak bersekolah
1	Tuna Netra	292	168	124	42%
2	Tuna Rungu	1136	824	312	27%
3	Tuna Grahita	4393	3458	935	21%
4	Tuna Daksa	951	224	727	76%
5	Tuna Laras	95	93	2	2%
6	ADHD	26	24	2	8%
7	Autis	279	275	4	1%
8	Ganda	754	433	321	43%
9	Lamban Belajar	614	614	0	0%
10	Kesulitan belajar	12	12	0	0%
11	Gangguan Komunikasi	12	6	6	50%
12	Kecerdasan diatas rata2	0	0	0	0%
Jumlah		8564	6131	2433	28%

Berdasarkan tabel 1 di atas anak tunadaksa paling banyak ditemukan belum mendapat akses pendidikan. Di sisi lain, apabila mereka dapat mengakses

sekolah reguler terdekat, maka mereka mempunyai peluang berhasil lebih besar dibandingkan anak dengan kebutuhan khusus lainnya meskipun di sekolah reguler yang belum menerapkan modifikasi kurikulum.

- d. Kesiapan sekolah maupun tenaga pengajar untuk mendukung implementasi sekolah inklusif belum ditunjang dengan bekal yang memadai sejak proses pendidikan guru.

Penelitian-penelitian terdahulu membuktikan bahwa guru mengajarkan apa yang mereka pikirkan (Edwards *et al.* 2006). Sikap menolak dari guru dan dukungan yang lemah terhadap kehadiran anak dengan kebutuhan khusus disebabkan oleh minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang anak dengan kebutuhan khusus. Latar belakang pendidikan yang tidak memberi bekal kepada guru tentang anak berkebutuhan khusus menyebabkan hampir semua guru reguler di sekolah dasar menghadapi permasalahan dalam menangani mereka. Disamping pengetahuan yang terbatas, penerimaan guru juga mempengaruhi perlakuan guru. Hal tersebut (penerimaan) juga masih jarang dijumpai (Bryan, 1997; Sale & Carey, 1995 dalam Pavri & Luftig; Cook, 2000) sehingga tidak heran bila pandangan negatif masih banyak tertuju pada anak dengan kebutuhan khusus. Pujian yang jarang dilakukan, harapan yang rendah, penolakan secara aktif, sering ditujukan kepada anak dengan kesulitan belajar dibandingkan dengan anak tanpa kesulitan belajar (Heron & Harris, 1993; Sitt *et al.* 1998 dalam Pavri & Luftig, 2000). Lopes *et al.* (2004) juga mengemukakan hal serupa bahwa guru reguler merasakan banyak beban ketika menghadapi anak dengan kesulitan belajar yang membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih banyak daripada teman-teman yang lain dan tidak menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Pengabaian terhadap kebutuhan anak tersebut dapat berdampak buruk pada anak-anak yang lain karena mereka belajar untuk tidak peduli pada teman yang 'lemah'. Rasa empati yang tidak berkembang pada anak-anak tersebut dapat berlanjut sampai mereka dewasa. Bagi anak dengan kebutuhan khusus, perlakuan lingkungan yang menolak dapat menyebabkan rendahnya penghargaan diri. Hal ini bertolak belakang dengan pendidikan inklusif seperti

yang dikemukakan oleh Johnsen & Skjorten (2004) bahwa pendidikan inklusif harus memberikan pendidikan yang akan mencegah anak-anak mengembangkan harga diri yang buruk serta konsekuensi yang dapat ditimbulkannya.

Kurikulum pendidikan guru di beberapa LPTK sudah membekali tentang pengetahuan anak dengan kebutuhan khusus dengan proporsi yang berbeda, sebagian diantaranya hanya memberikan khusus pada program studi PGSD. Selama ini pemberian matakuliah dilakukan terpisah dan belum terintegrasi dengan matakuliah lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan tantangan di lapangan yang menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan layanan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran di kelas. Modifikasi kurikulum dan perangkat pembelajaran yang mencakup modifikasi materi, media, metode serta evaluasi belajar selama ini masih menjadi tantangan di hampir semua sekolah inklusi.
- 2) Pemberian layanan untuk anak berkebutuhan khusus dilakukan secara kolaborasi antara guru khusus dan guru reguler/kelas. Kemampuan kolaborasi ini belum menjadi perhatian dalam proses pendidikan calon guru.

Urgensi penambahan sekolah yang mampu melayani anak berkebutuhan khusus (sekolah inklusif) seiring jumlah data anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam pendidikan menuntut kesiapan dari guru (reguler dan khusus). Penguasaan kompetensi guru (reguler dan khusus) yang mampu menangani berbagai ragam peserta didik (salah satu diantaranya anak dengan kebutuhan khusus) menjadi tanggungjawab LPTK untuk turut serta mendukung kebijakan pemerintah saat ini.

2. Pemuktakhiran Kompetensi Guru

Perubahan tantangan yang ada saat ini seiring penandatanganan konvensi penyandang disabilitas pada tahun 2011 maka dapat dipastikan semua anak dengan kebutuhan khusus berhak mengakses pendidikan di mana saja seiring bergulirnya

kebijakan mengenai sekolah inklusif. Hal tersebut tentu saja turut mewarnai kompetensi guru yang perlu dikembangkan oleh LPTK.

Saat ini kompetensi guru yang dikembangkan berdasarkan PP no 74 tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2008 bab II pasal 2 mendeskripsikan kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Profesionalisme guru terkait erat dengan kualitas pembelajaran yang dimunculkan di kelas dan hal tersebut dipengaruhi oleh keragaman peserta didik yang ada di kelas. Senada dengan pernyataan ini, Barbara Macgilchrist, Kate Myers, dan Jane Reed (2004 dalam Suyanto, 2007: 11) mengidentifikasi guru yang baik dengan beberapa karakteristik berikut: a) *explain things more deeply*, b) *are not quick and not too slow*, c) *do not ignore (pupils)*, d) *give (the pupils) choices*, dan d) *give you (pupils) ways of remembering things*. Ciri-ciri tersebut banyak menyiratkan bahwa guru perlu menyesuaikan dan memberikan alternatif pilihan sesuai dengan kemampuan anak tanpa menolak mereka. Fisher et al (2003 dalam Laarhoven et al, 2007) juga mengemukakan beberapa kompetensi tambahan untuk dikuasai oleh guru (khusus maupun reguler/umum) agar mampu menangani anak berkebutuhan khusus di kelas, antarlain:

- a. membuat akomodasi pembelajaran dan modifikasi kurikulum
- b. penguasaan teknologi pendukung
- c. pengelolaan perilaku
- d. supervisi pembelajaran

Saat ini, kompetensi pengelolaan perilaku masih jarang menjadi perhatian di LPTK. Sementara itu anak dengan gangguan perilaku merupakan tantangan nyata bagi guru reguler/umum. Schumm, et al (1995 dalam Dagle, et al. 2004) juga menuturkan bahwa peserta didik dengan perilaku menentang merupakan hambatan terbesar bagi guru reguler untuk memberikan adaptasi yang sesuai. Penambahan matakuliah yang memberikan ketrampilan pengelolaan perilaku menjadi kebutuhan bagi guru reguler/umum maupun khusus. Peterson & Beloin (1998 dalam Dagle, et al. 2004) menambahkan bahwa kemampuan tentang kriteria diagnostik dan karakteristik khusus

dari anak dengan kebutuhan khusus juga diperlukan oleh guru reguler/umum. Kemampuan tersebut sudah banyak diberikan dalam matakuliah ke PLB-an yang diperuntukkan kepada mahasiswa keguruan di LPTK untuk saat ini.

Berdasarkan tantangan mengenai keragaman peserta didik yang menuntut kompetensi guru maka ada beberapa analisis penulis terhadap empat kompetensi yang dicanangkan oleh pemerintah berdasarkan PP no 74 tahun 2008. Dari ke-empat kompetensi tersebut, terdapat beberapa hal spesifik yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan guru-guru agar mampu menangani peserta didik yang beragam. Keempat kompetensi tersebut antarlain:

- a. kompetensi pedagogik,
- b. kompetensi kepribadian,
- c. kompetensi sosial, dan
- d. kompetensi profesional

Beberapa hal khusus yang menjadi usulan pemuktahiran kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3: Pemuktahiran kompetensi pedagogik

No	Kompetensi pedagogik	Catatan khusus
a.	pemahaman wawasan atau landasan kependidikan	--
b.	pemahaman terhadap peserta didik	Keberagaman peserta didik, modalitas belajar dari anak dengan kebutuhan khusus yang dapat dioptimalkan
c	pengembangan kurikulum atau silabus	Penguasaan ketrampilan membuat modifikasi kurikulum dan pemberian akomodasi pembelajaran
d.	perancangan pembelajaran	
e.	pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis	Memberikan partisipasi yang sama kepada semua peserta didik Ketrampilan melakukan co-teaching dengan guru khusus
f.	pemanfaatan teknologi pembelajaran	Penguasaan teknologi pembelajaran yang membantu anak dengan kebutuhan khusus
g.	evaluasi hasil belajar	Fleksibilitas metode dan proses evaluasi pembelajaran
h.	pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya	Kemampuan pengelolaan perilaku bagi peserta didik yang mempunyai masalah perilaku

Tiga kompetensi lainnya sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan sehingga beberapa catatan khusus di atas menjadi usulan kepada LPTK untuk mempertimbangkan muatan materi dalam proses pendidikan calon guru maupun program sertifikasi guru. Diharapkan nantinya guru-guru yang dihasilkan mampu menjawab tantangan yang ada di sekolah dan siap untuk menyambut kebijakan pemerintah yang bergulir ke arah layanan pendidikan untuk peserta didik yang beragam.

3. Model Pendidikan Guru untuk Mendukung Pendidikan Inklusif

Berdasarkan telaah pada kompetensi pedagogi guru maka penulis menggarisbawahi perlunya pengayaan materi yang saat ini ada pada matakuliah yang terkait. Hal ini juga menjadi saran Strawderman & Lindsey (1995 dalam Laarhoven, 2007) menyatakan bahwa perubahan (redesain) pendidikan guru yang ada saat ini dapat dilakukan dengan:

1. Menambah matakuliah baru atau pengalaman lapangan baru atau dengan
2. Merevisi materi yang telah ada selama ini.

Strategi lain yang dapat ditempuh yaitu penentuan matakuliah yang diikuti oleh mahasiswa calon guru khusus dan calon guru reguler secara bersama-sama. Dampak dari strategi ini diteliti oleh O'Shea, Lee & Satter (1999 dalam Dianne M Gut, et al. 2003) pada matakuliah yang diikuti oleh calon guru (reguler maupun khusus) melalui berbagai aktivitas kolaboratif antar mahasiswa menemukan bahwa mahasiswa merasa lebih siap untuk membuat perencanaan pembelajaran, menggunakan berbagai strategi pembelajaran dan melakukan berbagai modifikasi. M Gut, et al. (2003) menegaskan bahwa dalam matakuliah di atas mengarahkan suasana pembelajaran yang membuka peluang berbagi pendapat untuk menentukan keputusan, komunikasi terbuka dan kolaborasi, calon guru (reguler dan khusus) diarahkan untuk membangun ketrampilan dan pemahaman profesi secara bersama-sama. Hal serupa juga menjadi kebijakan dalam rangka mempersiapkan guru (yang mengajar anak dengan atau tanpa kebutuhan khusus di sekolah reguler) yang dilakukan dengan memadukan antara pengetahuan pendidikan luar biasa dengan pendidikan secara umum meskipun kompetensi dari keduanya memiliki perbedaan (American Association of College for Teacher Education, 2002 dalam Digle, et al. 2004).

Selain kompetensi yang harus dicapai dalam pendidikan calon guru, terdapat beberapa sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan mengajar di sekolah inklusif, yaitu: pandangan positif Olson, Chalmers dan Hoover (1997 dalam Dagle, et al. 2004) menggarisbawahi satu hal utama dalam program pendidikan guru adalah pandangan positif kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus harus dimiliki oleh calon guru. Selain pandangan yang positif, diperlukan ketrampilan berkolaborasi dengan guru lain untuk menangani anak dengan keragaman kemampuan. Monahan, Marino & Miller (2000; Olson, Chalmers dan Hoover. 2007 dalam Dagle, et al. 2004) melakukan penelitian dengan hasil, bahwa 84 % responden dari 342 guru yang berpartisipasi menyatakan bahwa mereka harus mempunyai ketrampilan berkolaborasi dengan guru khusus.

C. PENUTUP

Pendidikan calon guru perlu menyesuaikan dengan perkembangan tantangan di dunia pendidikan dan kebijakan pemerintah saat ini. Keberadaan peserta didik yang beragam dan kebutuhan pemenuhan layanan pendidikan untuk mereka menuntut kompetensi yang perlu diperbarui. Hal tersebut berdampak pada pendidikan calon guru yang memerlukan redesain. Redesain pendidikan calon guru yang dikemukakan dalam makalah ini terdiri dari 3 alternatif, yaitu:

- a. Pengayaan materi perkuliahan keguruan yang menunjang kompetensi pedagogi
- b. Matakuliah dan atau PPL (praktik pengalaman lapangan) yang ditempuh secara bersama antara calon guru umum/reguler dengan calon guru khusus untuk memberikan peluang membangun kolaborasi
- c. Penambahan matakuliah baru (pengelolaan perilaku).

Daftar Pustaka

- Cook B.G, *et al.* (2000) "Teacher's Attitudes Toward their Included Students with Disabilities". *Exceptional Children*. Fall 2000;67, 1; ProQuest Education Journals pg. 115
- Dingle, Mary & Falvey, Mary A. Givner, Christine C & Haager, Diane (2004) *Essential Special and General Education For Preparing Teachers for Inclusive Settings*. *Issues in Teacher Education*, Spring. 2004. Volume 13, Number 1
- Edwards. C J. *et al.* (2006). "Influences of Experiences and Training on Effective Teaching Practices to Meet the Needs of Diverse Learners in School". *Education*; Spring 2006 126, 3; *ProQuest Education Journals* pg. 580
- Johnsen, B & Skjorten, M. D. (2004) *Menuju Inklusi: Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar*. Bandung: Unipub Forlag
- Kompas. 4 November 2009 pendidikan inklusi masih banyak kendala. Sumber: <http://edukasi.kompas.com/read/2009/11/04/0856498/Pendidikan.Inklusi.Masih.Banyak.Kendala>. Diakses tanggal: 12 Januari 2012
- Lopes, J.A., *et al.* (2004). "Teachers' Perception About Teaching Problem Students in Regular Classrooms". *Education & Treatment of Children*; Nov 2004; 27, 4; *ProQuest Education Journals* pg. 394
- M Gut, Dianne., Oswald, Karen., Leal, J Dorothy., Frederiksen, Laura., Gustafson, Janet M (2003) *Building the Foundation of Inclusive Education Through Collaborative Teacher Preparation: A University-School Partnership*. *College Student Journal*; Mar 2003,1; ProQuest Education Journals pg. 111
- Pavri, S & Luftig, R. (2000). "The Social Face of Inclusive Education; Are students with Learning disability Really Included in the Classroom?". *Preventing School Failure*; Fall 2000; 45,1; *ProQuest Education Journals*. Pg 8.
- Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2008 tentang guru
- Rice, Jenifer King (2003) *Teacher Quality : Understanding the effectiveness of teacher attributes*. Sumber: http://www.epi.org/publication/books_teacher_quality_execsum_intro/ Diakses pada tanggal 16 Januari 2012
- Suyanto. (2007). "Tantangan Profesional guru di Era Global". Pidato Dies Natalis ke-43 Universitas Negeri Yogyakarta pada 21 Mei 2007

Sutji Harijanto (2011) The Indonesian Government Policy on Special Education in Global Perspective. Makalah disampaikan dalam International seminar on Special Education pada 19 Maret 2011.

Van Laarhoven, Toni R., Munk, Dennis D., Lynch, Kathleen., Bosma, Julie and Rouse, Joanne (2007) A model for preparing special and general Education Preservice Teachers for Inclusive Education. *Journal of Teacher Education* 2007: 58; 440. Tersedia dalam <http://jte.sagepub.com/cgi/content/abstract/58/5/440> [22 Juli 2009]